

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adji, Oemar Seno, 1980, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Alfiah, Ratna Nurul, 1986, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, CV. Akademika Presindo, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang.
- Atmasasmita, Romli, 1992, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensiaisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011, *Hakim Komisaris dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Bahkri, Syaiful, 2009, *Hukum Pembuktian Dalam Praktik Peradilan Pidana*, Total Media, Yogyakarta.
- Black, Henry Campbell, 1979, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., United Stated.
- Chazawi, Adami, 2011, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana – Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Faal, M., 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2006, *Teori Hukum Pembuktian*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, M. Yahya, 2003, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2010, *Pembahasan Permasalahan KUHAP dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah dan RM Surachman, Andi, 2015, *Pre Trial Justice & Discretionary Justice Dalam KUHAP Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O. S., 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum Dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.
- Hulsman, M. L. Hc., 1984, *Sistem Peradilan Pidana : Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Irawan P. dan Pandapotan Simorangkir, Petrus, 1995, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, Ganda, Yogyakarta.
- Loqman, Loebby, 1984, *Pra-Peradilan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2002, *Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Acara Pidana*, Datacom, Jakarta.
- Lubis dan M. Haryanto, M. Sofyan, 2007, *Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktik Peradilan Pidana Di Indonesia*, Juxtapose, Yogyakarta.

- Mahmassani, Subhi, 1993, *Konsep Dasar Hak Asasi Manusia*, Tintamas Indonesia : Litera Antar Nusa, Jakarta.
- Makarao, Mohammad Taufik, 2010, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Rusli, 2011, *Sistem Peradilan Pidana*, UII Press, Yogyakarta.
- Muladi, 2002, *Demokratisasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.
- Prinst, Darwan, 1984, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, PT. Djambatan, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1993, *Praperadilan dan Perkembangannya Di Dalam Praktik*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Poernomo, Bambang, 1988, *Pola Dasar dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana*, Amarta Buku, Yogyakarta.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Hak Azazi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Rukmini, Mien, 2003, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Simorangkir, J. T. C., 1980, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Suriasumantri, Jujur S., 1986, *Ilmu Dalam Perspektif Moral, Sosial, dan Politik : Sebuah Dialog tentang Keilmuan Dewasa Ini*, Gramedia, Jakarta.

Tahir, Heri, 2010, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Winarta, Frans Hendra, 2000, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT. Elexmedia Komputindo, Jakarta.

Wisnubroto & G. Widiarta, A. I., 2005, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

## **B. Hasil Penelitian dan Penulisan Hukum**

Andy F. Sianturi, Abraham, 2012, “Kontrol Terhadap Penyitaan, Penggeledahan, dan Pemeriksaan Surat Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Penulisan Hukum*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Anggara, dkk., 2014, *Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Hukum Acara Praperadilan, Institute for Criminal Justice Reform*, Jakarta.

Anwar, Misbahul, 2015, “Dasar Penjatuhan Sanksi Tindakan Rehabilitasi Oleh Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelahgunaan Narkotika”, *Penulisan Hukum*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Aristeus, Syprianus, 2007, *Penelitian Hukum Tentang Perbandingan Antara Penyelesaian Putusan Praperadilan Dengan Kehadiran Hakim Komisaris Dalam Peradilan Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.

Eddyono, Supriyadi Widodo dan Erasmus A. T. Napitupulu, 2014, *Prospek Hakim Pemeriksa Pendahuluan Dalam Pengawasan Penahanan Dalam Rancangan KUHAP, Institute for Criminal Justice Reform*, Jakarta.

Eddyono, Supriyadi Widodo ,dkk, 2014, *Praperadilan di Indonesia : Teori, Sejarah, dan Praktiknya, Institute for Ciminal Justice Reform*, Jakarta.

Prastawa, Anggun, 2010, “Tinjauan Yuridis Keberadaan Sistem Hakim Komisaris Sebagai Alternatif Pengganti Sistem Pra Peradilan Untuk Memberikan Keadilan Dan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Secara

Efektif Dan Prospek Pengaturannya Dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana Yang Akan Datang”, *Penulisan Hukum*, Perpustakaan Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

### C. Makalah

I Made Gel Gel, “Beberapa Permasalahan Pelaksanaan KUHAP Dalam Bidang Penuntutan dan Hak-Hak Perlindungan Korban : Problematika dan Penegakannya”, Makalah disampaikan dalam *Seminar Dwi Windu KUHAP*, Surabaya, 20 Desember 1997.

Mardjono Reksodiputro, “Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi”, Makalah disampaikan dalam *Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta, 30 Oktober 1993.

### D. Jurnal

Maesa Plangiten, “Fungsi Dan Wewenang Lembaga Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia”, *Lex Crimen*, Volume II, Nomor 6, Oktober 2013.

Puteri Hikmawati, “Eksistensi Hakim Komisaris Dalam Sistem Peradilan Pidana (Analisis Terhadap RUU tentang Hukum Acara Pidana)”, *Kajian*, Volume 18, Nomor 1, Maret 2013.

Sandra Dini Febri Aristya, “Pembuktian Perdata Dalam Kasus Malpraktik Di Yogyakarta”, *Mimbar Hukum*, Edisi Khusus, November 2011.

### E. Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Undang-Undang

*Herzine Indische Reglement* atau Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui.

*Rechtsreglement Buitengewesten* atau Reglemen Untuk Daerah Seberang.

*Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 77 dan Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 dan Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 dan Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 dan Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 dan Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 dan Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143 dan Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 dan Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.1 PW.07.003 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.14 PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1985 tentang Penghentian Praperadilan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 1985 tentang Putusan yang Diucapkan di Luar Hadirnya Terdakwa.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 1974.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2012.

## **F. Putusan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 18/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 65/PUU-IX/2011.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 76/PUU-X/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014.

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 14/Pid.Prap/2010/PN.Jak.Sel.

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 33/Pid.Prap/2012/PN.Jak.Sel.

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 38/Pid.Prap/2012/PN.Jkt.Sel.

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :  
04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :  
18/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :  
32/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.

Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :  
36/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.

Putusan Ppraperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :  
55/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.Sel.

Putusan Kasasi Nomor : 152 PK/Pid/2010.

Putusan Kasasi Nomor : 87 PK/Pid/2013.

#### G. Surat Kabar dan Internet

Eddy O. S. Hiariej, “Hal Ikhwal Praperadilan”, *Kompas*, Rabu 8 April 2015.

Reza Syawawi, “Diktator Yudisial”, *Kompas*, Sabtu 22 Julil 2015.

Adnan Buyung Nasution, “Praperadilan Versus Hakim Komisaris”,  
<http://jodisantoso.blogspot.com/2008/02/praperadilan-versus-hakim-komisaris.html>, *jodisantoso.blogspot.com*, diakses pada tanggal 4 Juli 2015.

Anonim, “LeIP : Ada 130 Kasus Yang Diterima Kasusnya Oleh MA”,  
<http://nasional.kompas.com/read/2015/02/22/17174431/LeIP.Ada.130.Kasus.Praperadilan.yang.Diterima.Kasasinya.oleh.MA.html>,  
*kompas.com*, diakses tanggal 6 Juli 2015.

Anonim, “Permohonan Kasasi Terhadap Praperadilan Newmont Diterima  
Pengadilan”,  
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/holl1962/permohonan-kasasi-terhadap-praperadilan-newmont-diterima-pengadilan.html>,  
*www.hukumonline.com*, diakses tanggal 6 Juli 2015.

Anonim, “Putusan Praperadilan Chevron, Embrio Untuk KUHAP Baru”,  
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50b85ab45e92b/putusan->

[praperadilan-chevron--embrio-untuk-kuhap-baru.html](#),  
[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses tanggal 23 Juni 2015.

Anonim, “Saksi Ahli KPK : Penetapan Tersangka Bukan Upaya Paksa”,  
<http://nasional.kompas.com/read/2015/04/06/13384451/Saksi.Ahli.KPK.Penetapan.Tersangka.Bukan.Upaya.Paksa.html>, [www.kompas.com](http://www.kompas.com),  
diakses tanggal 11 Juni 2015.

Damang, “Tujuan dan Wewenang Praperadilan”,  
<http://www.negarahukum.com/hukum/tujuan-dan-wewenang-praperadilan.html>, [www.negarahukum.com](http://www.negarahukum.com), diakses pada Selasa 24  
Maret 2015.

Herry F. F. Battileo, “Penetapan Status Tersangka *Professional Judgement* Penyidik”,  
<http://www.suryantt.com/suryantt-berita-penetapan-status-tersangka—‘profesional-judgement’-penyidik---.html>,  
[www.suryantt.com](http://www.suryantt.com), diakses tanggal 22 Juni 2015.

Letezia Tobing, “Berapa Lama Seseorang Menyandang Status Tersangka”,  
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54dcc0dc1f4d0/berapa-lama-seseorang-menyandang-status-tersangka?.html>,  
[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diakses tanggal 22 Juni 2015.

Letezia Tobing, “Tentang Sistem Pembalikan Beban Pembuktian”,  
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt513ff99d6eedf/tentang-sistem-pembalikan-beban-pembuktian.html>, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com),  
diakses tanggal 3 Juli 2015.

Muhammad Tanziel Aziezi, “Pra Peradilan Penetapan Tersangka : Perjudian Hukum Yang Terbiarkan”,  
<https://www.selasar.com/politik/praperadilan-penetapan-tersangka-perjudian-hukum-yang-terbiarkan>,  
[www.selasar.com](http://www.selasar.com), diakses pada tanggal 4 Juli 2015.

Reda Mathovani, “Praperadilan Bukan Forum Koreksi Penetapan Tersangka?”,  
<http://budisansblog.blogspot.com/2015/02/praperadilan-bukan-forum-koreksi.html>, [budisansblog.blogspot.com](http://budisansblog.blogspot.com), diakses tanggal  
4 Juli 2015.



UNIVERSITAS  
GADJAH MADA

**Implikasi Lemahnya Pengaturan Perihal Praperadilan Dalam KUHPA Terhadap Pelaksanaan  
Pengujian Sah**

**Tidaknya Penetapan Tersangka**

RIZKA FAKHRY A, Sigid Riyanto, S.H., M.Si.

Universitas Gadjah Mada, 2015 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>